

**PENGARUH SIZE, KEMAKMURAN, UKURAN LEGISLATIF, LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA****Media Kusumawardani** ✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:

Understanding Regulation

Financial Supervision

Role of Local legislators

Personal Background

Political Background

Abstrak

Munculnya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia” telah memberikan tanggungjawab terhadap pemerintah daerah yang cukup besar. Tanggungjawab tersebut salah satunya dapat dibuktikan dengan kinerja pemerinrah daerah. Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5% dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

Abstract

TAP MPR No. XV/MPR/1998 emergence of the "Implementation of Regional Autonomy, Management, Allocation and Utilization of National Resources Justice Indonesia" has given the responsibility of local government big enough. Responsibility is one of them can be proved by the performance of local pemerinrah. Performance is a picture of the achievement of the vision, mission and goals of an organization. The results showed that the size, wealth, legislative measures, leverage simultaneously affect the financial performance of local government 31.5% and partially indicates that the variable size and more influenced legislative measures against the financial performance of local governments in Indonesia, while prosperity and leverage has no effect on performance local government finance in Indonesia.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fe@unnes.ac.id

ISSN 2252-6765

Pendahuluan

Munculnya TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia” merupakan suatu wujud pengembangan bangsa dan negara Indonesia yang menginginkan perubahan kinerja dalam proses kemajuan bangsa dan negara kearah yang lebih baik. TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum peraturan otonomi daerah dalam UU No.22/1999 dan diperbaruhi dengan UU No.32/2004. Munculnya pelimpahan kewenangan dari pusat terhadap daerah atau yang disebut otonomi daerah itu sendiri dalam konteks kinerja pemerintah memberikan dua sisi yang berbeda dimana sisi pertama adalah pemerintah memiliki kewenangan yang begitu luas atas daerahnya sedangkan disisi lainnya kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan mendapat tugas berat yang mengikuti aturan otonomi daerah tersebut yaitu tingginya transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat dari seluruh kinerja pemerintah daerah.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang terbaik bagi daerahnya setempat. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataan di Indonesia, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat. Hal ini sering dijumpai bahwa dana bantuan pusat masih jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bantuan pusat dapat dilihat pada Tabel 1 kota/kabupaten Indonesia (*djbnk.go.id*).

Tabel 1 menunjukkan 33 kota/kabupaten dari provinsi yang berbeda terdapat 32 kota/kabupaten memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil dari Dana Perimbangan. Sedangkan Florida (2006) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah memiliki ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Ketergantungan tersebut menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah. Rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah menggambarkan masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan masih bergantung pada pihak eksternal. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik, hal ini mendukung den-

gan pernyataan Mardiasmo (2009:121) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik lebih baik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Sumarjo,2010) adalah elemen di luar kontrol pemerintah dan elemen yang dapat dikontrol pemerintah.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama, kemakmuran dalam penelitian ini menggunakan PDB atau Produk Domestik Bruto. Kedua, kinerja keuangan diukur dengan rasio kemandirian. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan *Intergovernmental Revenue*. Keempat, Periode penelitian ini menggunakan tahun 2009.

Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Indonesia, peneliti memutuskan hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan pemerintah Indonesia secara keseluruhan dan sejauh mana keberhasilan program otonomi daerah dalam UU No.32/2004 yang hanya bisa dilakukan dengan mengikutsertakan objek pemerintah daerah se-Indonesia. Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh keuangan dan non keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Kawedar, dkk (2008:60) penggunaan informasi tentang kinerja adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran dari setiap kegiatan dan hasil dari setiap program. Sedangkan Bastian (2006:274) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja: Kinerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja; Lingkungan teknis dan Intitusional berpengaruh terhadap kinerja; Gomes dan Osborne (2010), kinerja tergantung dari lingkungan teknis dan institusional; Pelaporan kinerja berpengaruh terhadap kinerja.

Bastian (2006:307) menyatakan pelaporan kinerja sebagai motivator peningkatan kinerja. Pelaporan kinerja juga dapat disediakan untuk

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Tahun 2009

Kota/Kabupaten	Provinsi	PAD	Dana Perimbangan
Banda Aceh	N. Aceh Darussalam	50.000.000.000	418.211.000.000
Medan	Sumatra Utara	369.979.000.000	1.195.791.000.000
Padang	Sumatra Barat	132.183.000.000	720.667.000.000
Pekan baru	Riau	181.746.000.000	795.978.000.000
Jambi	Jambi	45.933.000.000	494.042.000.000
Palembang	Sumatra Selatan	196.108.000.000	947.774.000.000
Bengkulu	Bengkulu	34.068.000.000	420.253.000.000
Bandar Lampung	Lampung	69.909.000.000	674.336.000.000
Jakarta	DKI Jakarta	11.134.548.000.000	9.540.000.000.000
Bandung (kota)	Jawa Barat	374.712.000.000	1.363.218.000.000
Semarang (kota)	Jawa Tengah	259.411.000.000	925.109.000.000
Yogyakarta	DI Yogyakarta	135.107.000.000	507.653.000.000
Surabaya (kota)	Jawa Timur	864.083.000.000	1.459.643.000.000
Pontianak	Kalimantan Barat	16.456.000.000	245.267.000.000
Palang Karaya	Kalimantan Tengah	27.203.000.000	401.377.000.000
Banjarmasin	Kalimantan Selatan	63.642.000.000	453.224.000.000
Balikpapan	Kalimantan Timur	105.133.000.000	953.180.000.000
Manado	Sulawesi Utara	74.855.000.000	516.127.000.000
Palu	Sulawesi Tengah	46.052.000.000	425.576.000.000
Palopo	Sulawesi Selatan	19.032.000.000	311.693.000.000
Kendari	Sulawesi Tenggara	31.595.000.000	412.217.000.000
Denpasar	Bali	156.036.000.000	468.054.000.000
Mataram	Nusa Tenggara Barat	36.046.000.000	395.859.000.000
Kupang	Nusa Tenggara Timur	33.763.000.000	399.410.000.000
Ambon	Maluku	26.366.000.000	429.550.000.000
Jayapura	Papua	35.436.000.000	459.934.000.000
Ternate	Maluku Utara	29.205.000.000	378.342.000.000
Tangerang	Banten	151.898.000.000	754.354.000.000
Belitung	Bangka Belitung	40.960.000.000	339.393.000.000
Gorontalo	Gorontalo	73.903.000.000	334.515.000.000
Batam	Kepulauan Riau	184.208.000.000	758.330.000.000
Sorong	Papua Barat	17.581.000.000	365.527.000.000
Poliwali Mandar	Sulawesi Barat	20.945.000.000	436.632.000.000

Sumber: *djkk.depkue.go.id*

memotivasi kerja seseorang; Elemen di luar kontrol pemerintah dan elemen yang dapat dikontrol pemerintah berpengaruh terhadap kinerja; Sumarjo (2010) berpendapat bahwa elemen di luar kontrol pemerintah seperti demografi dan lingkungan, sedangkan elemen di dalam kontrol pemerintah adalah pola dan komposisi personalia; Gernon dan Meek (2007:204) menyatakan bahwa ukuran membantu perusahaan transna-

sional untuk mengidentifikasi, menilai dan untuk mengomunikasi aktiva” tidak berwujud” yang tidak dapat diungkapkan dalam tehnik pengukuran tradisional. Yang tidak berwujud tersebut digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja secara internal dalam proses sistematis dan berkelanjutan; Menurut Indriani dalam Nasser (2009) perusahaan yang memiliki total aktiva lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut telah mencapai tahap kedewasaan; Choi dan Meek (2005:199) menyatakan kontrol valuta asing yang membatasi ketersediaan mata uang akan menekan kinerja anak perusahaan. Kontrol gaji dan harga juga dapat merusak kinerja yang dilaporkan pada manajemen lokal; Kontrolabilitas merupakan atribut yang dapat mengarah keselarasan tujuan; Ikhsan dan Ishak (2005) menyatakan bahwa kontrolabilitas (pengendalian) dianggap diinginkan karena mengeluarkan aspek-aspek kinerja; Kemakmuran mempengaruhi kinerja. Yustika (2012) menyatakan pemerintah cukup melihat kinerja ekonomi dari pertumbuhan ekonomi; *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja. Perwitrasari (2010) semakin besar *leverage* yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk.

Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *Value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas (Mardiasmo, 2009: 4), adalah sebagai berikut : ekonomi, efisiensi, efektivitas. Sedangkan menurut Halim (2007:231) terdapat enam rasio yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, rasio pertumbuhan.

Size adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa *size* perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur *size* perusahaan (Nasser, 2009).

Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Mankiw (2006) Produk Domestik Bruto yang besar sesungguhnya memang membantu untuk menjalani hidup dengan baik. Produk Domestik Bruto tidak mengukur kesehatan, namun negara dengan Produk Domestik Bruto yang besar dapat menyediakan perawatan kesehatan yang lebih baik. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto dapat digunakan dalam pengukuran kemakmuran suatu negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak

dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Penguatan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setelah program otonomi daerah memang sesuatu yang didambakan sebagai pengontrol kinerja eksekutif (Bastian, 2006). Ikhsan dan Ishak (2005) menyatakan bahwa kontrolabilitas (pengendalian) dianggap diinginkan karena mengeluarkan aspek-aspek kinerja.

Leverage adalah Perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut. Menurut Wild, dkk (2005) *leverage* dapat diukur dengan *total debt ratio*, *total debt to equity*, *long-term debt to equity ratio*.

Size yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan dibidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja. Namun dengan adanya *size* yang besar, pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas karena *size* yang besar akan diikuti dengan resiko penyalahgunaan yang besar. Sedangkan akuntabilitas dapat ditunjukkan secara tidak langsung dengan perubahan kinerja keuangan pemerintah kearah yang lebih baik. Masyarakat pastinya tidak akan menuntut keakuntabilan *size* yang besar, apabila masyarakat sudah merasakan sendiri kenyamanan yang diberikan pemerintah atas hasil dari kinerja pemerintah yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah semakin besar tuntutan masyarakat dalam kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih baik seiring dengan *size* pemerintahan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa *size* dapat mempengaruhi kinerja. Nasser (2009) menyatakan bahwa semakin besar *size* maka semakin besar juga kinerja suatu entitas atau sebaliknya.

Kemakmuran juga disebut sebagai wujud peningkatan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan yang positif dimanfaatkan pemerintah guna mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah (Sumarjo, 2010). Meningkatkan infrastruktur akan memberikan kemudahan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang kemudian dapat memberikan pelayanan

masyarakat secara maksimal. Pelayanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo,2010). Pelayanan yang maksimal akan mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang lebih baik, sedangkan perbaikan dari kehidupan masyarakat secara tidak langsung memberi bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu prestasi. Prestasi tersebut menunjukkan adanya kinerja pemerintah yang layak diperhitungkan dalam pembuktiannya dibidang ekonomi yaitu kemakmuran dan segala manfaat dari kemakmuran yang telah dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa kemakmuran dapat mempengaruhi kinerja. Semakin tinggi kemakmuran semakin tinggi kinerja atau sebaliknya.

Secara logika semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggungjawab dan tingkat kemauan dalam bekerja. Sedangkan semakin tinggi tanggungjawab dalam bekerja akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatnya kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuknya titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya.

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melauai dana internalnya. Pendapat Sumarjo (2010) tersebut menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh

suatu entitas maka semakin buruk kinerja entitas tersebut atau sebaliknya. Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan Perwitasari (2010) pada sektor publik menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap kinerja.

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut :

: *Size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

: Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

: Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

: *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

: *Size*, kemakmuran, ukuran legislatif dan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Metode

Sampel dan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder penelitian ini adalah data dari keuangan dan non keuangan. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 sedangkan data non keuangan, seperti ukuran legislatif dapat dilihat dari karakteristik pemerintah daerah melalui website yang bersangkutan.

Definisi Operasional Variabel-Variabel Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Pemerintah	105	,005	,594	,07448	,067419
Size	105	5,288E10	1,979E13	2,31249E12	2,545665E12
Kemakmuran	105	2,300E11	2,805E13	4,45184E12	5,276593E12
Ukuran_Legislatif	105	20,000	56,000	37,25714	9,854742
Leverage	105	,000	,062	,00740	,011791
Valid N (listwise)	105				

Pengukuran kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio kemandirian. Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional. Sedangkan rumus rasio kemandirian daerah adalah

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *size* yang diukur dengan total aktiva, kemakmuran yang diukur dengan Produk Domestik Bruto, ukuran legislatif yang diukur dengan jumlah anggota legislatif atau DPRD, *leverage* yang diukur dengan

Alat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah dan variabel independen *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* yang menggunakan program SPSS versi 19.00

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data pada Tabel 2 dengan rata-rata kinerja keuangan pemerintah sebesar 7,4% sehingga data sampel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 105 data penelitian terdapat 29 kota/kabupaten diatas rata-rata kinerja dan 76 kota/kabupaten dibawah rata-rata (7,4%). *Size* memiliki rata-rata 2.304.289.366.089, sehingga dari data penelitian diketahui bahwa terdapat 31 daerah yang diatas rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut termasuk daerah yang besar dan sisanya sejumlah 74 kota/kabupaten dibawah rata-rata termasuk daerah yang kecil. Kemakmuran memiliki rata-rata sebesar 4.451.844.761.905, sehingga dari 105 kota/kabupaten terdapat 32 kota/kabupaten diatas rata-rata dan sisanya sejumlah 73 kota/kabupaten dibawah rata-rata. Ukuran Legislatif memiliki rata-rata sebesar 37 dengan jumlah anggota legislatif dengan 58 kota/kabupaten diatas rata-rata dan 47 kota/kabupaten dibawah rata-rata. *Leverage* memiliki rata-rata sebesar 0,01, dengan sebagian besar kota/kabupaten berada pada kategori dibawah rata-rata.

Analisis Regresi

Pengaruh *Size* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Size berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijadikan pembenaran tentang *size* yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian mengenai adanya pengaruh *size* terhadap kinerja keuangan pemerintah juga sesuai dengan penelitian

Sumarjo (2010) dan Ramasamy dkk (2005) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh *size* terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian ini menunjukkan kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran dalam penelitian yang diukur menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) dirasa tidak dapat menunjukkan kemakmuran yang sebenarnya karena menurut Usman (1988) nilai kemakmuran bersifat subjektif. Kemakmuran yang bersifat subjektif membuat pandangan masyarakat terhadap kemakmuran berbeda, hal ini membuat pengukuran yang tepat dan baku terhadap kemakmuran sangat sulit. Alasan lain tidak diterimanya H_{a2} adalah sulitnya pengukuran Produk Domestik Bruto (Mankiw, 2006), sehingga dapat terjadi kemungkinan bahwa nilai Produk Domestik Bruto tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya

Pengaruh Ukuran legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan hipotesis variabel ukuran legislatif menjelaskan bahwa peran dan fungsi pengawasan anggota legislatif jika berfungsi dengan baik dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan dalam pemerintah daerah yang diawasi dengan sangat baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat menjadi dasar alasan diterimanya H_{a3} karena semakin banyaknya anggota legislatif maka semakin ringan dan mudah dalam melaksanakan tugas, sedangkan semakin banyak pikiran yang tertuang untuk semakin mudah menyelesaikan suatu masalah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu pengawasan pemerintah daerah.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dpt dijelaskan ketika *leverage* menunjukkan pendanaan utang terhadap modal. Sedangkan menurut Bastian (2005) pendanaan dalam sektor publik adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Dari keempat pendapaaan tersebut pinjaman daerah adalah alternatif terakhir setelah Pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah dan Dana Perimbangan karena kedua hal tersebut tidak memiliki resiko yang tinggi, tidak ada beban bunga

dan tidak adanya tuntutan dalam pengembalian. Alasan lain yang berkaitan dengan pembiayaan eksternal yang berupa utang dalam suatu unit usaha mungkin dapat menjadi ukuran kemandirian karena dalam suatu unit usaha utang menjadi pendanaan yang patut diperhitungkan. Namun apabila *leverage* diterapkan dalam pemerintah daerah, posisi *leverage* tidak dapat disamakan pada kondisi dari suatu unit usaha karena pembiayaan eksternal pemerintahan daerah tidak hanya melalui utang tetapi juga berasal dari dana bantuan pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan.

Simpulan

Kinerja keuangan pemerintah daerah masih memiliki kinerja yang relatif rendah. Hal ini dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih rendah dari Dana Perimbangan. *Size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki *size* yang besar guna memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya. Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sulitnya ditemukannya pengukuran kemakmuran yang ideal, karena kemakmuran bersifat subjektif. Alasan lain tidak berpengaruhnya kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Produk Domesti Bruto yang perhitungannya kurang menunjukkan Produk Domestik Bruto yang sebenarnya. Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya anggota legislatif yang melakukan pengawasan secara baik maka akan semakin besar motivasi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat atau sebaliknya. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran *leverage* kurang tepat bila dihubungkan dengan pemerintah daerah karena posisi *leverage* suatu instansi non pemerintah berbeda dengan posisi *leverage* pada pemerintah daerah.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunannya penelitian ini penulis banyak memperoleh dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada :

Prof. Dr. Sudjiono Sastroatmodjo, M.Si,

Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun penelitian.

Drs. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam menyelesaikan penelitian di Universitas Negeri Semarang.

Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian di Universitas Negeri Semarang.

Amir Mahmud S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam membuat penelitian ini hingga selesai.

Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt., Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga penelitian ini selesai.

Drs. Sukardi Ikhsan M.Si., yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

Drs. Sukirman, M.Si., Dosen wali prodi Akuntansi (S1) B angkatan 2008 yang selalu memberi arahan dan motivasi selama menjalani perkuliahan.

Badingatus Solikhah. S.E. M.Si yang telah mendukung saya dalam penyusunan penelitian ini.

Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang khususnya dosen program Studi Akuntansi atas bekal ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya dan mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis kelak.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Demikian penelitian ini disusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang melimpah atas kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga kelak dikemudian hari penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. 2006. "Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi IX*
- Azhar, Mhd Karya Satya 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Modul Untuk Pelatihan laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. 1992. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Cara-cara untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. www.tutorialkuliah.blogspot.com. (27April2012)
- Choi, Frederick D.S dan Gary K. Meek .2005. *Akuntansi Internasional*. Jakarta: Salemba Empat
- Florida, Asha. 2006. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propensi Sumatera Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Gernon, Helen dan Gary K. Meek.2007. *Akuntansi perspektif Internasional Edisi 5*. Yogyakarta: Andi.
- Gey, Benny and Wim Moesen. 2008. *Exploring Sources of local Government Technical Inefficiency: Evidence from Flemish Municipalities*. WZB
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gomes, Ricardo C and Stephen P. Osborne. 2010. *The Role of Stakeholders in determining local Government Performance: Evidence from Barzil*. Brasilia: University of Edimburgh.
- Gujarati. 2003. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jogjakarta: BPFE.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan". *Simposium Akuntansi XII*.
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2009. *Metode penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Johnsen, Age. 2005. *Determinants of non-mandatory performance measurement in Norwegian local government: A comparison of political, economic and sociological explanations*. Switzerland: University of Bern.
- Kawedar, Warsito, dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 1*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusmuriyanto.2005. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Semarang : UPT. UnnesPress.
- Laraswita, Navalita dan E Indrayani.2008. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mankiw, N. Gregory.2006. *Principles of Economics*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasser, Abdul Hasibuan. 2009. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi,dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Propper, Carol and Deborah Wilson. 2003. "The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public Sector". *CMPO Working Paper series No.03/073*.
- Perwitrasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to The Level of accountability Disclosure of Indonesian's Local Government*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Ramasamy, Bala, Darryl Ong and Matthew.2005. "Firm Size, Ownership and performance in the Malaysian Palm Oil Industry". *Asian Academy of Management journal of Accounting and Financial*.
- Ryan, Christine, Marc Robinson and Trevor Grigg. 2000. "Financial Performance Indicator for Australian Local Government". *Accounting, Accountability and Performance* 6(2):pp. 89-106.
- Spica, Luciana dan Ikka Retrinasari. 2007. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ". *Proceeding Seminar Nasional*
- Sumarjo, Hendro.2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2008. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan". *Simposium Nasional Akuntansi XII*
- Susbiyani, Arik. 2001. *Pengaruh Size, Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, dan Jenis Industri Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Sutaryo, dkk. 2010. "Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi XIII*
- Suharyadi dan Purwanto S.K. 2003. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2008. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Suyono. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tambunan, Thulus T.H. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi 9*. Jakarta: Erlangga.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta www.bapenas.go.id(20 Januari 2012)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta. www.bapenas.go.id(20 Januari 2012)
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Departemen Negeri RI. Jakarta. www.bapenas.go.id(7 April 2012)
- Ulum, Bahrul Rusydi. 2010. *Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Usman, Wan. 1988. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Karunika. Universitas Terbuka.
- Warner, Mildred E. 2000. *Local Government Financial Capacity and The Growing Importance of State Aid*. Rural Development Perspectives vol. 13 no.3
- Wild, Jhon J, dkk. 2005. *Financial Statement Analysis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Absurditas Ekonomi Nasional*. Kompas: www.Ahmaderani.com(22 April 2012)